



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

## PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2017

### TENTANG

### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA/NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

#### BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 17).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA/NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan genealogis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal-usul Nagari diwilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Jumlah Nagari adalah jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Dana Desa/Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Nagari.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah nagari sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat

- kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota
- $Z1$  = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional
- $Z2$  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- $Z3$  = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- $Z4$  = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/kota yang memiliki Desa
- $DD_{kab/kota}$  = pagu Dana Desa kabupaten/kota
- $AD_{kab/kota}$  = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

### **Pasal 6**

Indeks kesulitan geografis Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 7**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENYALURAN DANA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Nagari dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Nagari diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan:
  - a. Peraturan Nagari mengenai APBNagari kepada Bupati; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Nagari tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

**BAB IV**  
**PENGGUNAAN DANA DESA**

**Pasal 9**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
  - a. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
  - b. Pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
  - e. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - f. Peningkatan investasi ekonomi nagari melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
  - g. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMNag atau BUMNag bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat nagari lainnya;
  - h. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Nagari;
  - i. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat nagari, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat nagari (KPMN) dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di nagari (*community centre*);
  - j. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesri, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di nagari;
  - k. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan nagari dan hutan kemasyarakatan;
  - l. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - m. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan nagari dan telah ditetapkan dalam musyawarah nagari.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Nagari mengenai APBNagari.

### **Pasal 10**

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V**

### **PELAPORAN DANA DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Wali Nagari dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Nagari Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen APB Nagari dan/laporan realisasi penggunaan dana nagari semester sebelumnya;
  - b. Terdapat Sisa Dana Nagari di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Nagari tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
- Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Wali Nagari yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNagari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Nagari disetiap Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

*W* **IRFENDI ARBI**

DIUNDANGKAN DI : SARILAMAK  
PADA TANGGAL : 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

*W* **YENDRI TOMAS**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN: 2017 NOMOR: 1

**TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM**

3/1/2017

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 3 JANUARI 2017**  
**TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA**  
**DESA DISETIAP DESA/NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH**  
**KOTA TAHUN ANGGARAN 2017**

| NO          | NAMA DESA/ NAGARI                    | Alokasi Dasar<br>(90 %) | Alokasi Berdasarkan<br>Formula (10 %) | Pagu Dana Nagari<br>per-Nagari |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| (1)         | (2)                                  | (3)                     | (4)                                   | (5)                            |
| <b>I</b>    | <b>Kecamatan Suliki</b>              | <b>4.322.652.000</b>    | <b>489.341,594</b>                    | <b>4.811.993,594</b>           |
| 1           | KURAI                                | 720.442.000             | 89.887,221                            | 810.329,221                    |
| 2           | SUNGAI RIMBANG                       | 720.442.000             | 76.614,302                            | 797.056,302                    |
| 3           | TANJUANG BUNGO                       | 720.442.000             | 79.614,901                            | 800.056,901                    |
| 4           | SULIKI                               | 720.442.000             | 72.368,031                            | 792.810,031                    |
| 5           | LIMBANANG                            | 720.442.000             | 89.421,676                            | 809.863,676                    |
| 6           | ANDIANG                              | 720.442.000             | 81.435,462                            | 801.877,462                    |
| <b>II</b>   | <b>Kecamatan Guguak</b>              | <b>3.602.210.000</b>    | <b>702.630,608</b>                    | <b>4.304.840,608</b>           |
| 1           | GUGUAK VIII KOTO                     | 720.442.000             | 218.346,770                           | 938.788,770                    |
| 2           | VII KOTO TALAGO                      | 720.442.000             | 152.248,047                           | 872.690,047                    |
| 3           | SUNGAI TALANG                        | 720.442.000             | 114.225,980                           | 834.667,980                    |
| 4           | KUBANG                               | 720.442.000             | 138.999,181                           | 859.441,181                    |
| 5           | SIMPANG SUGIRAN                      | 720.442.000             | 78.810,630                            | 799.252,630                    |
| <b>III</b>  | <b>Kecamatan Payakumbuh</b>          | <b>5.043.094.000</b>    | <b>905.204,522</b>                    | <b>5.948.298,522</b>           |
|             | KOTO BARU SIMALANGGANG               | 720.442.000             | 157.603,923                           | 878.045,923                    |
| 1           | TAEH BUKIK                           | 720.442.000             | 137.036,224                           | 857.478,224                    |
| 2           | SIMALANGGANG                         | 720.442.000             | 149.859,365                           | 870.301,365                    |
| 3           | SUNGAI BERINGIN                      | 720.442.000             | 88.577,081                            | 809.019,081                    |
| 4           | PIOBANG                              | 720.442.000             | 106.816,445                           | 827.258,445                    |
| 5           | TAEH BARUAH                          | 720.442.000             | 175.628,661                           | 896.070,661                    |
| 6           | KOTO TANGAH SIMALANGGANG             | 720.442.000             | 89.682,822                            | 810.124,822                    |
| <b>IV</b>   | <b>Kecamatan Luak</b>                | <b>2.881.768.000</b>    | <b>614.793,572</b>                    | <b>3.496.561,572</b>           |
| 1           | TJ. HARO SIKABU-KABU PD. PANJANG     | 720.442.000             | 164.128,288                           | 884.570,288                    |
| 2           | MUNGO                                | 720.442.000             | 204.119,336                           | 924.561,336                    |
| 3           | SUNGAI KAMUYANG                      | 720.442.000             | 139.566,329                           | 860.008,329                    |
| 4           | ANDALEH                              | 720.442.000             | 106.979,619                           | 827.421,619                    |
| <b>V</b>    | <b>Kecamatan Harau</b>               | <b>7.924.862.000</b>    | <b>1.516.351,182</b>                  | <b>9.441.213,182</b>           |
| 1           | TARAM                                | 720.442.000             | 164.405,597                           | 884.847,597                    |
| 2           | SOLOK BIO BIO                        | 720.442.000             | 115.703,877                           | 836.145,877                    |
| 3           | TARANTANG                            | 720.442.000             | 90.944,117                            | 811.386,117                    |
| 4           | BUKIK LIMBUKU                        | 720.442.000             | 77.242,571                            | 797.684,571                    |
| 5           | HARAU                                | 720.442.000             | 145.117,982                           | 865.559,982                    |
| 6           | BATU BALANG                          | 720.442.000             | 169.965,629                           | 890.407,629                    |
| 7           | SARILAMAK                            | 720.442.000             | 346.938,602                           | 1.067.380,602                  |
| 8           | GURUN                                | 720.442.000             | 85.543,396                            | 805.985,396                    |
| 9           | LUBUAK BATINGKOK                     | 720.442.000             | 101.089,327                           | 821.531,327                    |
| 10          | KOTO TUO                             | 720.442.000             | 124.498,184                           | 844.940,184                    |
| 11          | PILUBANG                             | 720.442.000             | 94.901,900                            | 815.343,900                    |
| <b>VI</b>   | <b>Kecamatan Pangkalan Koto Baru</b> | <b>4.322.652.000</b>    | <b>1.074.046,894</b>                  | <b>5.396.698,894</b>           |
| 1           | MANGGILANG                           | 720.442.000             | 194.684,223                           | 915.126,223                    |
| 2           | TANJUANG BALIK                       | 720.442.000             | 118.267,851                           | 838.709,851                    |
| 3           | GUNUANG MALINTANG                    | 720.442.000             | 255.514,175                           | 975.956,175                    |
| 4           | PANGKALAN                            | 720.442.000             | 269.979,407                           | 990.421,407                    |
| 5           | KOTO ALAM                            | 720.442.000             | 119.393,483                           | 839.835,483                    |
| 6           | TANJUNG PAUH                         | 720.442.000             | 116.207,755                           | 836.649,755                    |
| <b>VII</b>  | <b>Kecamatan Kapur IX</b>            | <b>5.043.094.000</b>    | <b>1.090.187,552</b>                  | <b>6.133.281,552</b>           |
| 1           | MUARO PAITI                          | 720.442.000             | 162.050,851                           | 882.492,851                    |
| 2           | KOTO BANGUN                          | 720.442.000             | 125.586,041                           | 846.028,041                    |
| 3           | LUBUAK ALAI                          | 720.442.000             | 115.275,739                           | 835.717,739                    |
| 4           | KOTO LAMO                            | 720.442.000             | 137.111,158                           | 857.553,158                    |
| 5           | DURIAN TINGGI                        | 720.442.000             | 125.102,932                           | 845.544,932                    |
| 6           | SIALANG                              | 720.442.000             | 229.455,486                           | 949.897,486                    |
| 7           | GALUGUA                              | 720.442.000             | 195.605,345                           | 916.047,345                    |
| <b>VIII</b> | <b>Kecamatan Gunuang Omeh</b>        | <b>2.161.326.000</b>    | <b>497.525,311</b>                    | <b>2.658.851,311</b>           |
| 1           | PANDAM GADANG                        | 720.442.000             | 167.775,728                           | 888.217,728                    |
| 2           | KOTO TINGGI                          | 720.442.000             | 238.378,982                           | 958.820,982                    |
| 3           | TALANG ANAU                          | 720.442.000             | 91.370,601                            | 811.812,601                    |



| NO          | NAMA DESA/ NAGARI                     | Alokasi Dasar<br>(90 %) | Alokasi Berdasarkan<br>Formula (10 %) | Pagu Dana Nagari<br>per-Nagari |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>IX</b>   | <b>Kecamatan Lareh Sago Halaban</b>   | <b>5.763.536.000</b>    | <b>1.130.331,115</b>                  | <b>6.893.867,115</b>           |
| 1           | LABUAH GUNUANG                        | 720.442.000             | 125.376,371                           | 845.818,371                    |
| 2           | BATU PAYUANG                          | 720.442.000             | 138.387,366                           | 858.829,366                    |
| 3           | AMPALU                                | 720.442.000             | 189.475,840                           | 909.917,840                    |
| 4           | BUKIK SIKUMPA                         | 720.442.000             | 92.643,862                            | 813.085,862                    |
| 5           | BALAI PANJANG                         | 720.442.000             | 156.379,978                           | 876.821,978                    |
| 6           | HALABAN                               | 720.442.000             | 142.168,841                           | 862.610,841                    |
| 7           | TANJUANG GADANG                       | 720.442.000             | 140.240,152                           | 860.682,152                    |
| 8           | SITANANG                              | 720.442.000             | 145.658,705                           | 866.100,705                    |
| <b>X</b>    | <b>Kecamatan Situjuah Limo Nagari</b> | <b>3.602.210.000</b>    | <b>653.332,950</b>                    | <b>4.255.542,950</b>           |
| 1           | SITUJUAH BATUA                        | 720.442.000             | 137.542,334                           | 857.984,334                    |
| 2           | SITUJUAH LADANG LAWEH                 | 720.442.000             | 96.666,798                            | 817.108,798                    |
| 3           | TUNGKA                                | 720.442.000             | 137.180,229                           | 857.622,229                    |
| 4           | SITUJUAH BANDA DALAM                  | 720.442.000             | 128.290,780                           | 848.732,780                    |
| 5           | SITUJUAH GADANG                       | 720.442.000             | 153.652,809                           | 874.094,809                    |
| <b>XI</b>   | <b>Kecamatan Mungka</b>               | <b>3.602.210.000</b>    | <b>653.700,473</b>                    | <b>4.255.910,473</b>           |
| 1           | JOPANG MANGANTI                       | 720.442.000             | 84.480,852                            | 804.922,852                    |
| 2           | SIMPANG KAPUAK                        | 720.442.000             | 155.845,116                           | 876.287,116                    |
| 3           | MUNGKA                                | 720.442.000             | 148.200,994                           | 868.642,994                    |
| 4           | TALANG MAUR                           | 720.442.000             | 130.819,354                           | 851.261,354                    |
| 5           | SUNGAI ANTUAN                         | 720.442.000             | 134.354,156                           | 854.796,156                    |
| <b>XII</b>  | <b>Kecamatan Bukik Barisan</b>        | <b>3.602.210.000</b>    | <b>744.300,144</b>                    | <b>4.346.510,144</b>           |
| 1           | MAEK                                  | 720.442.000             | 227.041,709                           | 947.483,709                    |
| 2           | BANJA LOWEH                           | 720.442.000             | 132.634,621                           | 853.076,621                    |
| 3           | BARUAH GUNUANG                        | 720.442.000             | 129.126,573                           | 849.568,573                    |
| 4           | SUNGAI NANIANG                        | 720.442.000             | 144.045,642                           | 864.487,642                    |
| 5           | KOTO TANGAH                           | 720.442.000             | 111.451,599                           | 831.893,599                    |
| <b>XIII</b> | <b>Kecamatan Akabiluru</b>            | <b>5.043.094.000</b>    | <b>884.454,084</b>                    | <b>5.927.548,084</b>           |
| 1           | SARIAK LAWEH                          | 720.442.000             | 184.360,654                           | 904.802,654                    |
| 2           | KOTO TANGAH BATU AMPA                 | 720.442.000             | 197.301,925                           | 917.743,925                    |
| 3           | BATUHAMPAR                            | 720.442.000             | 127.739,137                           | 848.181,137                    |
| 4           | SUAYAN                                | 720.442.000             | 146.943,305                           | 867.385,305                    |
| 5           | SUNGAI BALANTIAK                      | 720.442.000             | 77.546,049                            | 797.988,049                    |
| 6           | PAUH SANGIK                           | 720.442.000             | 78.744,151                            | 799.186,151                    |
| 7           | DURIAN GADANG                         | 720.442.000             | 71.818,863                            | 792.260,863                    |
|             | <b>Total</b>                          | <b>56.914.918.000</b>   | <b>10.956.200,000</b>                 | <b>67.871.118,000</b>          |

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 3 Januari 2017

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

*W* IRFENDI ARBI

